

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitiann**

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka.

Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sbagai saham dan Bursa Efek Surabaya sebagai obligasi dan derivatif menjadi BEI. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007.

BEI menggunakan sistem perdagangan bernama *Jakarta Automated Trading System (JATS)* sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG.

Bursa Efek Indonesia Juga memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan perusahaan. Visi Bursa Efek Indonesia adalah untuk menjadi burssa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia, dengan misi yaitu menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

## 2. Sejarah

Secara historis, pasar modal telah hadir sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia yang mengharuskan Bursa Efek harus ditutup, diantaranya pada tahun 1914-1918 bursa efek ditutup karena terjadinya perang dunia I. Bursa Efek Indonesia sempat dijalankan

kembali pada tahun 1925-1942, namun karena isu politik, yaitu perang dunia II, bursa efek di Semarang dan Surabaya harus ditutup kembali di awal tahun 1939, dan dilanjutkan dengan penutupan Bursa Efek di Jakarta pada tahun 1942-1952.

Perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1956-1977, perdagangan di Bursa Efek harus vakum

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Agustus 1977. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali Pasar Modal ini juga ditandai dengan *go public* PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.

Namun pada tahun 1977-1987 perdagangan di Bursa Efek Indonesia lesu. Jumlah emiten hingga tahun 1987 baru mencapai 24 emiten. Pada saat itu masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal. Akhirnya pada tahun 1987 diadakan deregulasi bursa efek dengan menghadirkan Paket Desember

1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Aktivitas perdagangan Bursa efek pun kian meningkat pada tahun 1988-1990 setelah paket deregulasi di bidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan.

Bursa Paralel Indonesia mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) pada tahun 1988 dengan organisasinya yang terdiri dari broker dan dealer. Selain itu, ditahun yang sama pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk *go public* dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. Bursa Efek Surabaya (BES) di tahun 1989 mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.

Pada tanggal 12 Juli 1992, yang telah ditetapkan sebagai HUT BEJ, BEJ resmi menjadi perusahaan swasta (swastanisasi). Bapepam yang sebelumnya Badan Pelaksana Pasar Modal berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Satu tahun kemudian pada tanggal 21 Desember 1993, PT Pemingkat Efek Indonesia (PEFINDO) didirikan. Pada tanggal 22 Mei 1995, Bursa Efek Jakarta

meluncurkan Sistem Otomasi Perdagangan yang dilaksanakan dengan sistem komputer JATS (*Jakarta Automated Trading System*). Ditahun yang sama pada 10 November, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996.

Bursa Paralel Indonesia (BPI) kemudian merger dengan Bursa Efek Surabaya. Kemudian satu tahun berikutnya, 6 Agustus 1996, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan. Dilanjutkan dengan pendirian Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) ditahun berikutnya, 23 Desember 1997. Sistem perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless trading*) pada tahun 2000 mulai diaplikasikan dipasar modal Indonesia, dan di tahun 2002 BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (*remote trading*). Ditahun yang sama, perubahan transaksi T+4 menjadi T+3 pun selesai. Di tahun 2004, Bursa Efek Indonesia merilis Stock Option.

Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Surabaya (BES) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) akhirnya digabungkan dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah lahirnya BEI, Suspensi perdagangan diberlakukan pada tahun 2008 dan penilai

Harga Efek Indonesia (PHEI) dibentuk pada tahun 2009. Selain itu, pada tahun 2009 PT Bursa Efek Indonesia mengubah sistem perdagangan yang lama (JATS) dan meluncurkan sistem perdagangan terbarunya yang digunakan oleh BEI sampai sekarang, yaitu JATS-NextG. Beberapa badan lainnya juga didirikan guna untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, seperti pendirian *PT Indonesian Capital Market Electronic Library* (IcaMel) pada Agustus 2011. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Januari 2012, dan di akhir 2012, Securities Investor Protection Fund (SIPF), dan Prinsip Syariah dan Mekanisme Perdagangan Syariah juga diluncurkan. BEI juga melakukan beberapa pembaharuan, tanggal 2 Januari 2013 jam perdagangan diperbaharui, dan ditahun berikutnya *Lot Size* dan *Tick Price* disesuaikan kembali, dan ditahun 2015 TICMI bergabung dengan IcaMel.

Bursa Efek Indonesia juga membuat suatu kampanye yang disebut dengan “Yuk Nabung Saham” yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia Untuk mau memulai berinvestasi di pasar modal. BEI memperkenalkan kampanye tersebut pertama kali pada tanggal 12 November 2015, dan kampanye ini masih dilaksanakan sampai sekarang, dan di tahun yang sama LQ-45 Index Futures

diresmikan. Pada tahun 2016, Tick Size dan batas *Autorejection* kembali disesuaikan, IDX Channel diluncurkan, dan BEI di tahun ini turut ikut serta menyukseskan kegiatan Amnesti Pajak serta meresmikan *Go Public Information Center*. Pada tahun 2017, IDX Incubator diresmikan, relaksasi margin, dan peresmian *Indonesia Securities Fund*. Ditahun 2018 lalu, sistem perdagangan dan New Data Center telah diperbaharui, launching penyelesaian Transaksi T+2 (*T+2 Settlement*) dan penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat.

## **B. Data Penelitian**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama tahun 2016-2018. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Berdasarkan kriteria sampel yang digunakan diperoleh sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan dengan total data 45 laporan keuangan perusahaan . data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan. Analisis dan pembahasan yang tersaji dalam bab ini menguji pengaruh

*Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Adapun perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Daftar Nama Perusahaan**

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Kode</b>
1	Adaro Energy Tbk	ADRO
2	Aneka Tambang Tbk	ANTM
3	Ratu Prabu Energi Tbk	ARTI
4	Citatah Tbk	CTTH
5	Darma Henwa Tbk	DEWA
6	Elnusa Tbk	ELSA
7	Golden Energy Mines Tbk	GEMS
8	Harum Energi Tbk	HRUM
9	Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP
10	Samindo Resource Tbk	MYOH
11	Bukit Asam Tbk	PTBA
12	Radiant Utama Interisco Tbk	RUIS
13	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT
14	SMR Utama Tbk	SMRU
15	Toba Bara Sejahtera Tbk	TOBA

**Tabel 4.2**

**Hasil Perhitungan Data Kepemilikan Institusional**

<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	ADRO	44 %	44%	44%
2	ANTM	65%	65%	65%
3	ARTI	47%	35%	35%
4	CTTH	52%	57%	53%
5	DEWA	64%	64%	64%
6	ELSA	41%	41%	41%
7	GEMS	67%	67%	67%
8	HRUM	74%	74%	79%
9	MBAP	60%	60%	60%

10	MYOH	63%	63%	59%
11	PTBA	73%	73%	73%
12	RUIS	42%	60%	38%
13	SMMT	77%	89%	89%
14	SMRU	49%	50%	52%
15	TOBA	72%	83%	71%

Sumber : Data diolah

**Tabel 4.3**

**Hasil Perhitungan Data Komposisi Dewan Komisaris Independen**

No.	Kode Emiten	2016	2017	2018
1	ADRO	0,4	0,4	0,4
2	ANTM	0,33	0,33	0,4
3	ARTI	0,5	0,5	0,5
4	CTTH	0,33	0,66	0,5
5	DEWA	0,33	0,4	0,33
6	ELSA	0,4	0,4	0,4
7	GEMS	0,5	0,5	0,5
8	HRUM	0,33	0,33	0,33
9	MBAP	0,33	0,33	0,33
10	MYOH	0,33	0,33	0,25
11	PTBA	0,37	0,37	0,33
12	RUIS	0,33	0,33	0,33
13	SMMT	0,6	0,33	0,33
14	SMRU	0,5	0,33	0,5
15	TOBA	0,66	0,4	0,4

Sumber : Data diolah

**Tabel 4.4**

**Hasil Perhitungan Data Jumlah Dewan Komisaris**

No.	Kode Emiten	2016	2017	2018
1	ADRO	5	5	5
2	ANTM	6	6	5
3	ARTI	2	2	2
4	CTTH	3	3	4

5	DEWA	6	5	6
6	ELSA	5	5	5
7	GEMS	6	6	6
8	HRUM	6	6	6
9	MBAP	3	3	3
10	MYOH	3	3	4
11	PTBA	8	8	6
12	RUIS	3	3	3
13	SMMT	5	3	3
14	SMRU	2	3	2
15	TOBA	3	5	5

Sumber : Data diolah

**Tabel 4.5**

**Hasil Perhitungan Data Komite Audit**

No.	Kode Emiten	2016	2017	2018
1	ADRO	3	3	3
2	ANTM	4	4	2
3	ARTI	2	3	3
4	CTTH	2	2	2
5	DEWA	3	3	3
6	ELSA	3	3	3
7	GEMS	3	3	3
8	HRUM	3	3	3
9	MBAP	3	3	3
10	MYOH	3	3	3
11	PTBA	2	2	2
12	RUIS	3	3	3
13	SMMT	3	3	3
14	SMRU	3	3	3
15	TOBA	3	3	3

Sumber : Data diolah

Tabel 4.6

Hasil Perhitungan Data Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No.	Kode Emiten	2016	2017	2018
1	ADRO	0,38	0,42	0,42
2	ANTM	0,42	0,43	0,31
3	ARTI	0,07	0,44	0,92
4	CTTH	0,22	0,32	0,44
5	DEWA	0,8	0,74	0,77
6	ELSA	0,24	0,3	0,27
7	GEMS	0,28	0,28	0,26
8	HRUM	0,39	0,24	0,17
9	MBAP	0,5	0,29	0,36
10	MYOH	0,28	0,43	0,2
11	PTBA	0,01	0,18	0,31
12	RUIS	0,51	0,61	0,39
13	SMMT	0,31	0,25	0,03
14	SMRU	0,2	0,06	0,03
15	TOBA	0,44	0,22	0,3

Sumber : Data diolah

### C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui sebaran nilai masing-masing variabel pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, nilai dan standar deviasi.

Hasil dari analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

**Tabel 4.7**  
**Statistik Deskriptif**

		Statistics				
		KINS	KDKI	JDK	KA	Y_Transform
N	Valid	45	45	45	45	45
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		60,11	,4002	4,38	2,87	,5577
Median		63,00	,3700	5,00	3,00	,5568
Std. Deviation		14,141	,09384	1,614	,457	,18114
Variance		199,965	,009	2,604	,209	,033
Minimum		35	,25	2	2	,10
Maximum		89	,66	8	4	,96
Sum		2705	18,01	197	129	25,10

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil diatas terlihat bahwa nilai minimal Variabel Y (*Tax Avoidance*) adalah 0,10. Hal ini berarti menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan membayar kas pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai beban pajak yang dikenakan pada laporan laba rugi. Nilai maksimum variabel Y sebesar 0,96. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam membayar kas pajak. Jumlah kas pajak yang dibayarkan lebih besar jika dibandingkan dengan nilai beban pajak laporan laba rugi.

Nilai rata-rata untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur dengan model estimasi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebesar 0,55 dengan std.deviasi

0,18. Perbandingan antara nilai std.deviasi dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai std deviasi berada di bawah nilai rata-rata. Hal ini berarti tingkat variasi data variabel Y terbilang kecil.

Tabel 4.7 menunjukkan analisis deskriptif variabel kepemilikan institusional. Nilai rata-rata kepemilikan institusional pada tahun 2016-2018 sebesar 60,11%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata saham perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dimiliki oleh perusahaan institusional cukup tinggi. Artinya tiap 100% total saham yang beredar pada sampel perusahaan terdapat 60,11% saham yang dimiliki oleh pihak institusional dari jumlah total saham beredar. Nilai Std.deviasi dalam kepemilikan institusional sebesar 14,14%, nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata dari kepemilikan institusional sebesar 60,11% sehingga dapat diartikan bahwa data kepemilikan institusional tergolong baik. Nilai kepemilikan institusional terendah adalah 35%, artinya jumlah kepemilikan institusional di dalam perusahaan yang beredar. Dan nilai tertinggi sebesar 89%.

Tabel 4.7 menunjukan analisis deskriptif variabel komposisi dewan komisaris independen. Nilai rata-rata komposisi dewan komisaris independen pada tahun 2016-

2018 sebesar 0,4 atau 40%. Hal ini berarti dari 100% jumlah total dewan komisaris di dalam perusahaan sampel penelitian terdapat 40% dewan komisaris independen. Nilai ini juga menunjukkan rata-rata perubahan sampel dikatakan baik, karena rata-rata memiliki komisaris independen dengan proporsi sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan aturan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 4.7 menunjukkan analisis deskriptif variabel jumlah dewan komisaris. Nilai rata-rata jumlah dewan komisaris pada tahun 2016-2018 sebesar 4,38. Nilai std.deviasi dalam jumlah dewan komisaris sebesar 1,61, nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata dari jumlah dewan komisaris sebesar 4,38%. Sehingga dapat diartikan bahwa data dari jumlah dewan komisaris tergolong baik. Nilai jumlah dewan komisaris terendah adalah 2, artinya jumlah dewan komisaris yang bekerja di dalam perusahaan. Dan nilai tertinggi sebesar 8.

Tabel 4.7 menunjukkan analisis deskriptif variabel jumlah komite audit. Nilai rata-rata jumlah komite audit pada tahun 2016-2018 sebesar 2,87. Nilai std.deviasi dalam jumlah komite audit sebesar 0,45, nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata dari jumlah komite audit sebesar 2,87 sehingga dapat diartikan bahwa data dari

jumlah komite audit tergolong baik. Nilai jumlah komite audit terendah adalah 2, artinya jumlah komite audit yang bekerja di dalam perusahaan. Dan nilai tertinggi sebesar 4.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

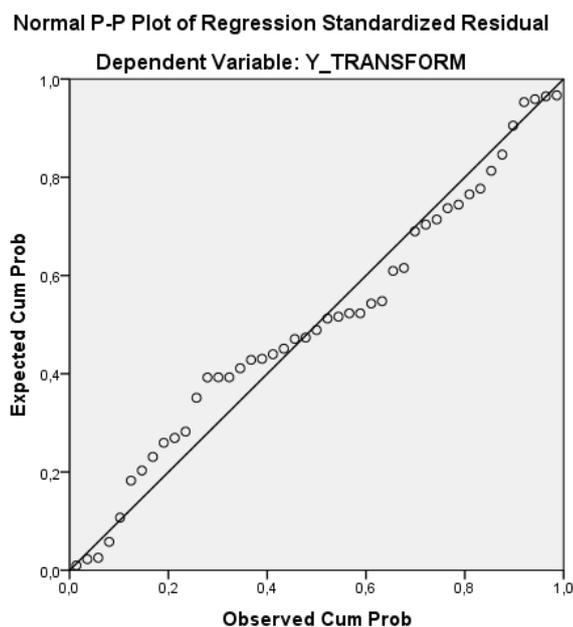
### **a) Hasil Pengujian Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

### **1) Hasil Uji Normalitas Secara Grafik**

Untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu data dapat dilihat berdasarkan gambar p-p plot. Jika titik mendekati garis diagonal maka dinyatakan normal (Ghozali 2011 : 110). Berikut ini adalah hasil uji normalitas secara grafik.

**Gambar 4.1**  
**Uji Normalitas Data**



Sumber : Data diolah

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (mengikuti pada wilayah garis linear). Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal dan model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu *tax avoidance* berdasarkan masukan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan komite audit.

## 2. Hasil Uji Normalitas Secara Statistik

Uji normalitas secara grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik (Ghozali, 2011 : 149). Adapun hasil perhitungan uji normalitas secara statistik yang dilihat berdasarkan uji *kolmogorov-smirnov* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**

***One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,16696936
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,121
	Positive	,094
	Negative	-,121
Test Statistic		,121
Asymp. Sig. (2-tailed)		,098 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah

Berdasarkan uji kolmogorov-smirnov dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai Asymp. Sig. > 0,05, ini mengartikan bahwa semua data terdistribusi dengan normal.

b. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Penelitian dilakukan pengujian terhadap data bahwa data harus terbebas dari gejala multikolinearitas, gejala ini ditunjukkan dengan korelasi antar variabel. Pengujian dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) harus berada di bawah 10 dan nilai tolerance diatas 0,1 hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.9**

**Hasil Pengujian Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1			
	KINS	,835	1,198
	KDKI	,915	1,093
	JDK	,817	1,224
	KA	,951	1,051

a. Dependent Variable: Y\_TRANSFORM

Sumber : Data diolah

Tabel di atas menjelaskan bahwa data yang ada tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel independen yaitu dengan melihat nilai VIF. Nilai

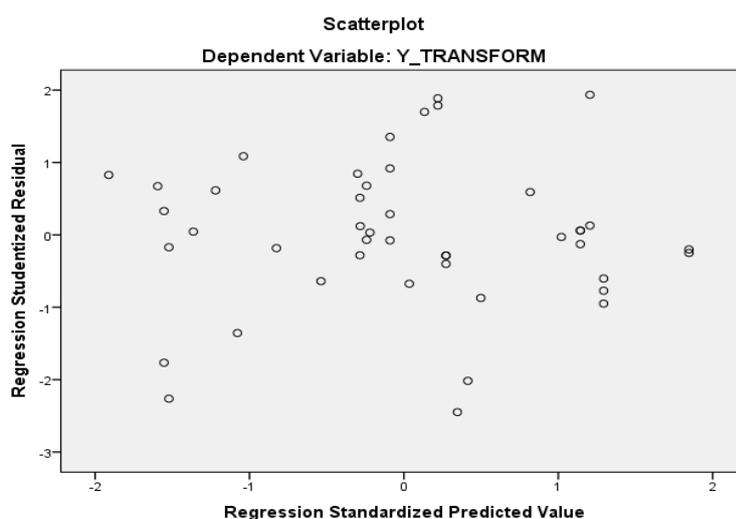
VIF diperbolehkan hanya mencapai 10 maka data diatas dapat dipastikan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Karena data di atas menunjukkan bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance di atas 0,1. Keadaan seperti itu membuktikan tidak terjadinya multikolinearitas.

c. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Heterokedastisitas varian variabel dependen (*Tax Avoidance*) dalam model tidak layak terhadap variabel independen. Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah estimator yang diperoleh tidak efisien, baik pada sampel kecil maupun besar. Diagnosis adanya heterokedastisitas dalam uji regresi dapat diidentifikasi dari pola *scatter plot* diagram.

**Gambar 4.2**

**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : Data diolah

Pada gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak terlihat pola tertentu. Dengan demikian pada persamaan regresi linear berganda dalam model ini tidak ada gejala atau tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu  $t$  pada periode  $t-1$  (Sebelumnya). untuk mengetahui apakah model regresi terdeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka salah satu caranya dengan melakukan uji Durbin-Watson (DW test). Berikut adalah tabel untuk pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi.

**Tabel 4.10****Pengambilan Keputusan ada dan tidaknya autokorelasi**

<b>Hipotesis Nol</b>	<b>Keputusan</b>	<b>Jika</b>
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak Ditolak	$Du < d \leq 4 - du$

Sumber : Ghozali (2014)

Adapun hasil pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.11****Hasil Uji Autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test)**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,388 <sup>a</sup>	,150	,065	,17512	1,779

a. Predictors: (Constant), KA, KINS, KDKI, JDK

b. Dependent Variable: Y\_TRANSFORM

Sumber : Data diolah

Nilai DW sebesar 1,779 akan dibandingkan dengan nilai tabel pada signifikansi 5%. Jumlah sampel (N) 45 dan jumlah variabel independen 4 ( $k=4$ ). Tabel 4.11 menunjukkan uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yaitu nilai DW sebesar 1,779 lebih besar dari batas atas ( $du$ ) 1,7200 dan kurang dari  $4-1,7200=2,2800$  ( $4-du$ ), sesuai dengan tabel 4.11 mengenai keputusan uji Durbin-Watson (DW test)  $du < d < 4-du$ . Oleh karena nilai DW 1,779 lebih besar dari batas atas ( $du$ ) 1,7200 dan kurang dari  $4-1,7200(4-du)$ , ( $1,7200 < 1,779 < 2,2800$  sehingga dengan nilai DW yang diperoleh dan setelah dibandingkan dengan nilai  $du$  maka dalam model regresi ini dinyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat autokorelasi.

### **3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

#### **a Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda**

Adapun hasil regresi linier berganda berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *corporate governance* (kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris

independen, jumlah dewan komisaris, komite audit) terhadap *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,347	,270		1,287	,206
	KINS	-,004	,002	-,277	-1,735	,091
	KDKI	,084	,294	,044	,287	,776
	JDK	,012	,018	,107	,662	,511
	KA	,118	,059	,297	1,990	,053

a. Dependent Variable: Y\_TRANSFORM

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Sebagai berikut :

$$Y = 0,347 - 0,004 X_1 + 0,084 X_2 + 0,012 X_3 + 0,118 X_4$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan koefisiensi regresi untuk konstan sebesar 0,347 menunjukkan dewan kepemilikan

institusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan komite audit bernilai nol atau tidak naik ataupun turun atau bernilai konstan (tetap) maka nilai *tax avoidance* adalah 0,347satuan.

Variabel kepemilikan institusional sebesar -0,004 menunjukkan bahwa jika variabel kepemilikan institusional meningkat 1 satuan maka akan mengurangi *tax avoidance* sebesar 0,004satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Variabel komposisi dewan komisaris independen sebesar 0,084 menunjukkan bahwa jika variabel komposisi dewan komisaris independen meningkat 1 satuan akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,084 satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Variabel jumlah dewan komisaris sebesar 0,012 menunjukkan bahwa jika variabel jumlah dewan komisaris meningkat 1 satuan akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,012, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Variabel komite audit sebesar 0,118 menunjukkan bahwa jika variabel komite audit meningkat 1 satuan akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,118 dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

b Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Penggunaan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R<sup>2</sup>) lebih baik dalam melihat seberapa baik model dibandingkan koefisien determinasi. Koefisien determinasi disesuaikan merupakan hasil penyesuaian koefisien determinasi terhadap tingkat kebebasan dari persamaan prediksi. Berikut merupakan hasil uji determinasi:

**Tabel 4.13**

**Hasil Pengujian Adjusted R Square**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,388 <sup>a</sup>	,150	,065	,17512	1,779

a. Predictors: (Constant), KA, KINS, KDKI, JDK

b. Dependent Variable: Y\_TRANSFORM

Sumber : Data diolah

Berdasarkan pengujian serentak (Adjusted R<sup>2</sup>) dapat diketahui besarnya koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>). Dari koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) dapat diketahui derajat ketepatan dari analisis regresi linear berganda menunjukkan besarnya variasi sumbangan empat variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Besarnya nilai pengaruh

variabel ditunjukkan oleh nilai (Adjusted  $R^2$ ) = 0,065 yaitu persentasi pengaruh variabel kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan komite audit mempengaruhi *tax avoidance* hanya sebesar 6,5% sisanya sebesar 93,5% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini, seperti ukuran perusahaan, *leverage*, kualitas audit, *return on assets*, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan manajerial dan lain-lain.

#### **4. Hasil Uji Hipotesis**

Berdasarkan hasil uji parsial dengan menggunakan uji T dan koefisien determinasi dengan  $R^2$  dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **a Uji Parsial (Uji T)**

Uji *t* bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris dan komite audit secara parsial terhadap *tax avoidance*.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Parsial**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,347	,270		1,287	,206
	KINS	-,004	,002	-,277	-1,735	,091
	KDKI	,084	,294	,044	,287	,776
	JDK	,012	,018	,107	,662	,511
	KA	,118	,059	,297	1,990	,053

a. Dependent Variable: Y\_TRANSFORM

Sumber : Data diolah

Berdasarkan pada tabel *coefficients* di atas untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

- 1) Menguji Signifikansi Variabel Kepemilikan Institusional ( $X_1$ )

Terlihat bahwa  $t_{hitung}$  koefisien kepemilikan institusional adalah -1,735, sedangkan  $t_{tabel}$  bisa dihitung pada tabel  $t_{test}$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , karena digunakan hipotesis dua arah , ketika mencari  $t_{tabel}$  nilai  $\alpha$  dibagi 2 menjadi 0,025 dan  $df = 43$  (didapat dari rumus  $n-2$ , dimana  $n$  adalah jumlah data,  $45-2=43$ . Didapat  $t_{tabel}$  adalah 2,01.

$t_{hitung} < t_{tabel}$ , ( $-1,735 < 2,01$ ), maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

## 2) Menguji Signifikansi Komposisi Dewan Komisari Independen ( $X_2$ )

Terlihat bahwa  $t_{hitung}$  koefisiensi komposisi dewan komisaris independen adalah 0,287, sedangkan  $t_{tabel}$  bisa dihitung pada tabel  $t_{test}$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari  $t_{tabel}$  nilai  $\alpha$  dibagi 2 menjadi 0,025 dan  $df = 43$  (didapat dari rumus  $n-2$ , dimana  $n$  adalah jumlah data,  $45-2=43$ ). Didapat  $t_{tabel}$  adalah 2,01.

$t_{hitung} < t_{tabel}$ , ( $-0,287 < 2,01$ ), maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien komposisi dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

## 3) Menguji Signifikansi Jumlah Dewan Komisaris ( $X_3$ )

Terlihat bahwa  $t_{hitung}$  koefisiensi jumlah dewan komisaris adalah 0,662, sedangkan  $t_{tabel}$  bisa dihitung pada tabel  $t_{test}$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari  $t_{tabel}$  nilai  $\alpha$  dibagi 2 menjadi 0,025 dan  $df = 43$  (didapat dari rumus  $n-2$ , dimana  $n$  adalah jumlah data,  $45-2=43$ ). Didapat  $t_{tabel}$  adalah 2,01.

$t_{hitung} < t_{tabel}$ ,  $(-0,662 < 2,01)$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien jumlah dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### 4) Menguji Signifikansi Komite Audit ( $X_4$ )

Terlihat bahwa  $t_{hitung}$  koefisiensi komite audit adalah 1,990, sedangkan  $t_{tabel}$  bisa dihitung pada tabel  $t_{test}$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari  $t_{tabel}$  nilai  $\alpha$  dibagi 2 menjadi 0,025 dan  $df = 43$  (didapat dari rumus  $n-2$ , dimana  $n$  adalah jumlah data,  $45-2=43$ ). Didapat  $t_{tabel}$  adalah 2,01.

$t_{hitung} < t_{tabel}$ ,  $(1,990 < 2,01)$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### b Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris dan komite audit secara simultan atau serentak.

Tabel 4.15

## Hasil Uji Simultan

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,217	4	,054	1,769	,154 <sup>b</sup>
	Residual	1,227	40	,031		
	Total	1,444	44			

a. Dependent Variable: Y\_TRANSFORM

b. Predictors: (Constant), KA, KINS, KDKI, JDK

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F dapat dilihat nilai  $F_{hitung}$  sebesar 1,769 dengan signifikansi 0,154. Dengan mencari pada tabel F, diperoleh nilai  $F_{tabel}$  2,61. Dengan kondisi dimana  $F_{hitung}$  lebih kecil daripada  $F_{tabel}$  dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat diambil kesimpulan adalah  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti variabel-variabel independen (kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris dan komite audit) tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

### c Pembahasan

#### 1. Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.14, diperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ ,  $(-1,735 < 2,01)$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka tidak akan memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi investor luar negeri, atau bank kecuali kepemilikan individual. Pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mengindikasikan manajemen akan mempertimbangkan kepemilikan (*ownership*) dalam melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun mekanisme *corporate governance* sudah baik, namun penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan tidak bergantung pada proporsi kepemilikan institusional, mungkin juga praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat disebabkan oleh seberapa besar institusi terlibat dalam manajerial perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Damayanti dan Susanto (2015) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Dan kontradiktif dengan penelitian (Ngadiman dan Puspitasari, 2014; Fadhilah, 2014; Laily, 2017) menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya (Nurindah, 2013).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya shleifer dan Vishney (1986), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Seharusnya hal ini dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, tapi pemilik institusional ini juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, karena terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan

manajemen atas sikap *opportunitiesnya* dalam melakukan manajemen laba (Isnanta, 2008).

Menurut Jasen dan Meckling (1976) dalam Sujoko (2006) memaparkan bahwa hasil penelitian temuan ini tidak mendukung *agency theory*, karena berdasarkan *agency theory* terdapat pemisahan antara pemilik dan pengelola, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan peranan pendiri perusahaan sangat dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan.

## **2. Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.14, diperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ ,  $(-0,287 < 2,01)$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bawa komposisi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen maka tidak akan memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai

direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, di samping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laily (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi maupun semakin rendah komposisi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak dapat berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadhilah (2014), menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pertama, tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat

menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Kedua, kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen yang kurang tangap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan *tax avoidance* atau pajak agresif dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajiban kepada negara terutama pajak.

### 3. Jumlah Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.14, diperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , ( $-0,662 < 2,01$ ), maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah dewan komisaris independen tidak memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dewan komisaris yang berperan sebagai pemegang saham cenderung menginginkan hasil yang lebih besar, dengan kewajiban pajak yang lebih kecil. Dalam penelitian Sefiana (2010) jumlah dewan komisaris pada perusahaan sampel tidak berpengaruh untuk mengurangi manajemen

laba. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan. Penelitian yang dilakukan Nasution dan Setyawan (2007) dalam Sefiana (2010) memaparkan bahwa kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggungjawab dewan komisaris. Banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat ditarik garis merah bahwa efektivitas mekanisme pengendalian *tax avoidance* tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu perusahaan serta peran dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian terhadap manajemen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012).

#### **4. Komite Audit terhadap terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.14, diperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , ( $1,990 < 2,01$ ), maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah komite

audit tidak memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut peraturan BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Nomor IX.15, yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Di antaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Komite audit memiliki tujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaporan dan aktivitas perusahaan telah di jalan sesuai dengan koridor yang tepat, sehingga *good corporate governance* dapat secara efektif diterapkan di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak

Hasil penelitian ini kontradiktif dengan (Annisa dan Kurniasih, 2012) ; reza, 2012) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan, faktor komite audit yang berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax*

*avoidance*) adalah jumlah anggota di mana memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, persentase kehadiran anggota komite audit dalam rapat komite audit yang memiliki pengaruh positif terhadap penghindran pajak, dan latar belakang anggota komite audit yang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berlawanan karena jumlah komite audit yang berada dalam suatu perusahaan tidak memberikan jaminan perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* dan jumlah komite dan jumlah komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan. Penambahan komite audit hanya untuk memenuhi keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 yang menetapkan komite audit terdiri dari paling sedikit 3(tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013); Kurniasih dan Sari (2013) dan Swingly dan Surakartha (2015).